

PROSPEK DAN STRATEGI INVESTASI: MENELUSURI POTENSI SEKTOR UNGGULAN KOTA BUKITTINGGI

Tamadara Hilman

DIV Logistik Bisnis, Universitas Logistik Bisnis Internasional

Email: tamadara@ulbi.ac.id

Abstrak

Kota Bukittinggi, sebagai salah satu destinasi investasi menarik di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tercermin dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang konsisten melebihi rata-rata provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik minat investor dengan mengidentifikasi lapangan usaha unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bukittinggi. Metode analisis yang digunakan melibatkan Location Quotient dan Shift Share Analysis dalam membahas 17 sektor perekonomian. Hasil penelitian menyoroti 7 sektor yang menonjol sebagai lapangan usaha unggulan, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Temuan ini diharapkan dapat memberi wawasan strategis kepada para investor untuk fokus pada sektor unggulan, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

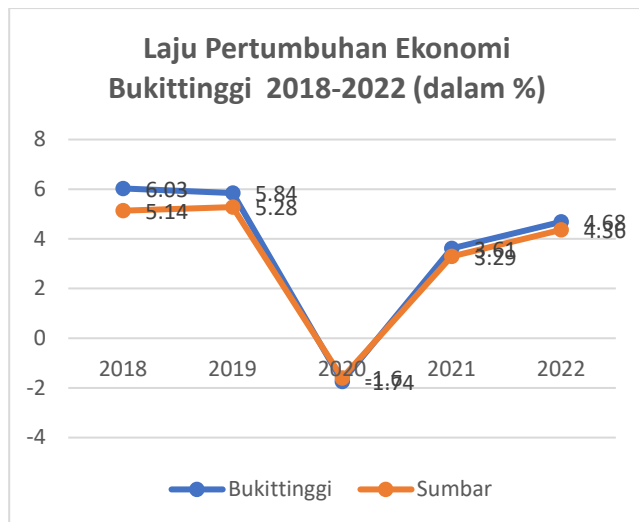
Kata Kunci: *Sektor Unggulan, Investasi, Location Quotient (LQ), Shift Share Analysis (SSA), Bukittinggi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang digemari dan menarik minat untuk investasi, baik dalam maupun luar negeri. Investasi dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Investasi selaras dengan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang kuat menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

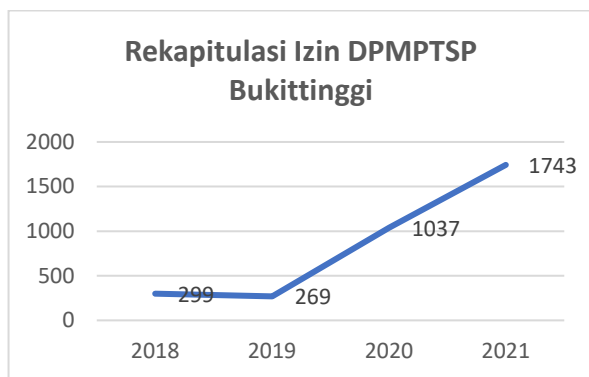
Di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi terbuka bagi para investor, namun diperlukan sebuah kajian dalam mencari peluang bidang untuk investasi terbaik. Pemerintah Bukittinggi melakukan berbagai upaya seperti promosi dan pengembangan kerjasama regional hingga internasional. Program pengembangan ini didasari oleh berbagai potensi wilayah yang memiliki sektor unggulan dalam bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan (Rancangan Akhir RPJMD Kota Bukittinggi, 2021-2026). Peningkatan produksi barang dan jasa akan

menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yang akan memicu peningkatan investasi suatu daerah (Silvia, Wardi, and Aimon 2013). Instrumen yang dapat menarik investor dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bukittinggi. Gambar 1 menunjukkan rata-rata LPE Bukittinggi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Provinsi Sumatera Barat, walaupun kedua regional tersebut mengalami penurunan drastis di tahun 2020 yang dapat diasumsikan karena akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini menjadi salah satu sinyal yang menunjukkan potensi untuk berinvestasi di Kota Bukittinggi.



Gambar 1 LPE Bukittinggi Tahun 2018-2022

Potensi investasi juga tercermin melalui izin yang dikeluarkan pemerintah Kota Bukittinggi, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP). Sejak tahun 2018 yang tercatat pada situs dinas tersebut, jumlah izin yang diterbitkan terus mengalami peningkatan. Izin ini terdiri dari berbagai sektor baik di bidang perdagangan, pertanian, reklame, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Gambar 2 menunjukkan peningkatan izin penanaman modal juga memperlihatkan keseriusan pemerintah Bukittinggi dalam membangun iklim investasi.



Gambar 2 Izin Dinas Penanaman Modal Tahun 2018-2021

Dalam rencana merealisasikan peningkatan investasi di Bukittinggi, dibutuhkan kajian mengenai potensi ekonomi dari lapangan usaha yang menyumbang pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 17 sektor lapangan usaha tercatat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (BPS Kota Bukittinggi, 2021) yang kemudian

akan dianalisa lebih lanjut dengan tujuan mengetahui lapangan usaha unggulan yang berpotensi dilakukan investasi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bermanfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi bahan pertimbangan para investor yang hendak melakukan investasi pada sektor perekonomian Kota Bukittinggi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan peran sebuah sektor atau komoditas di suatu wilayah regional terhadap besarnya peran sektor dan komoditas tersebut terhadap lingkup provinsi atau nasional. Analisis LQ umumnya dipakai untuk membandingkan produksi regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit sedangkan nasional adalah daerah yang lebih luas. Dalam kajian ini berarti membandingkan sektor Kota Bukittinggi sebagai regional dan Sumatera Barat sebagai nasional. Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan, 2005):

- 1) Bila LQ suatu sektor/komoditas > 1 maka sektor tersebut dikatakan sebagai sektor unggulan.
- 2) Bila LQ suatu sektor/komoditas < 1 maka sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.
- 3) Bila LQ suatu sektor/komoditas = 1 maka sektor tersebut mempunyai kontribusi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mampu memenuhi permintaan akan sektor tersebut dari luar.

Pernyataan lain mengenai nilai LQ yang serupa dengan penjelasan sebelumnya yaitu (Putra 2011):

- 1) LQ > 1, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (*Relative Specialization in Sector*). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.
- 2) LQ < 1, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (*Production Deficit in Sector*). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
- 3) LQ = 1, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak

untuk diekspor (*Average Production in Sector*).

LQ dapat mengidentifikasi komoditas/ sektor basis (unggulan) dan non-basis (bukan unggulan). LQ dapat menjadi alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ ini secara umum digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat mendukung pertumbuhan sektor lain, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Sambodo dalam (Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- 2) Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.
- 3) Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang.
- 4) Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

LQ dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program dan pengolahan data yang rumit (Marsela, 2019). Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari excel atau program lotus, bahkan jika datanya tidak terlalu banyak kalkulator pun bisa digunakan. Kesederhanaan metode LQ menuntut akurasi data, sebaik apapun hasil olahan LQ tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan tidak valid (Marsela, 2019).

Rumus analisis LQ dengan pendekatan nilai tambah atau pendapatan:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Keterangan:

Vi: nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Vt: total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Yi: nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih tinggi

Yt: total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih tinggi

Jika hasil perhitungan dari formulasi di atas menghasilkan:

- 1) $LQ > 1$ artinya, komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
- 2) $LQ = 1$ komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- 3) $LQ < 1$ komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

2.2 Shift Share Analysis (SSA)

Shift share analysis (SSA) sering digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor atau pergeseran sektor yang sama dalam perekonomian sosial. Data yang dapat dianalisis menggunakan SSA yaitu kegiatan ekonomi atau ketenagakerjaan (Putra, 2011). SSA juga dapat membandingkan perbedaan laju pertumbuhan sektor (industri) di wilayah yang sempit disebut daerah dengan wilayah yang lebih luas disebut nasional (Tarigan, 2005). Suatu daerah yang memiliki banyak sektor yang tingkat pertumbuhannya lambat maka sektor tersebut pertumbuhannya secara nasional juga akan lamban. Hal ini terjadi karena daerah-daerah lain tumbuh lebih cepat (Putra, 2011).

Rumus SSA yang digunakan dalam kajian ini:

$$KPN = \left(\frac{Y_t}{Y_0} \right) - 1$$

$$KPP = \left(\frac{Y_{it}}{Y_{io}} \right) - \left(\frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$KPPW = \left(\frac{y_{it}}{y_{io}} \right) - \left(\frac{Y_t}{Y_0} \right)$$

$$PE = KPN + KPP + KPPW \quad PB = KPP + KPPW$$

Keterangan

KPN: Komponen Pertumbuhan Nasional

KPP: Komponen Pertumbuhan Proporsional

KPPW: Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

PE: Pertumbuhan Ekonomi

PB: Pergeseran Bersih

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan LQ untuk sektor lapangan usaha Kota Bukittinggi berdasarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini sesuai dengan penghasilan tahun terkait (Sumardi, 2020). Berikut merupakan data yang digunakan untuk kemudian diolah dengan perhitungan LQ.

Tabel 1 PDRB ADH Berlaku Kota Bukittinggi 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	96.373,81	99.508,03	101.411,38	104.286,12	112.008,15	513.587,49
2	Pertambangan dan Penggalian	189,91	190,75	186,58	188,72	197,8	953,76
3	Industri Pengolahan	453.172,38	437.222,66	447.376,30	461.860,48	503.980,03	2.303.611,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	57.336,96	63.023,35	59.164,34	61.602,26	64.835,08	305.961,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.630,30	12.622,31	13.187,98	12.950,88	13.491,31	63.882,78
6	Konstruksi	532.094,14	578.563,89	577.807,99	594.344,15	657.647,76	2.940.457,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	2.709.773,96	2.958.607,74	2.910.422,94	2.993.968,47	3.491.546,44	15.064.319,55
8	Transportasi dan Pergudangan	877.271,61	943.611,46	868.106,21	922.465,30	1.031.660,91	4.643.115,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	480.609,98	526.064,01	405.653,81	430.783,11	515.564,38	2.358.675,29
10	Informasi dan Komunikasi	507.205,72	567.676,54	622.251,49	664.303,48	750.590,00	3.112.027,23
11	Jasa Keuangan	442.449,69	465.959,44	481.106,92	543.877,71	601.038,91	2.534.432,67
12	Real Estate	276.035,54	289.203,11	292.009,19	299.283,91	329.850,66	1.486.382,41
13	Jasa Perusahaan	51.378,83	56.386,13	55.389,48	56.237,82	61.868,33	281.260,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	485.248,96	538.923,42	581.858,04	611.333,02	640.926,31	2.858.289,75
15	Jasa Pendidikan	453.039,62	506.537,37	545.305,28	558.228,69	613.701,48	2.676.812,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	264.427,99	293.425,72	337.934,34	360.062,94	392.389,70	1.648.240,69
17	Jasa Lainnya	312.822,60	357.574,64	328.374,14	350.787,50	412.723,31	1.762.282,19
Total		8.011.062,00	8.695.100,57	8.627.546,41	9.026.564,56	10.194.020,56	44.554.294,10

Data selanjutnya yang dibutuhkan merupakan PDRB ADH Berlaku Provinsi Sumatera Barat yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 PDRB ADH Berlaku Sumatera Barat 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	53.385.352,97	54.487.563,89	54.196.737,78	54.886.617,53	60.509.909,43	277.466.181,60
2	Pertambangan dan Penggalian	9.832.802,96	10.576.705,18	10.340.461,15	10.617.529,62	11.681.756,97	53.049.255,88
3	Industri Pengolahan	20.960.544,83	20.618.591,64	20.916.975,32	22.257.188,19	24.361.764,18	109.115.064,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	259.098,03	263.753,97	248.983,83	259.385,24	271.603,48	1.302.824,55
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	208.775,32	222.769,91	220.537,58	236.134,14	258.515,43	1.146.732,38
6	Konstruksi	22.181.121,48	24.810.569,29	24.661.106,32	25.775.645,56	28.702.172,36	126.130.615,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	35.243.163,45	38.823.319,90	38.155.311,05	40.085.274,67	47.077.997,52	199.385.066,59
8	Transportasi dan Pergudangan	29.148.302,60	30.989.519,25	25.283.032,31	26.041.915,07	31.060.821,62	142.523.590,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.146.008,36	3.509.548,64	2.993.935,11	3.209.318,05	3.863.152,93	16.721.963,09
10	Informasi dan Komunikasi	12.589.287,85	14.285.587,52	15.583.234,39	16.739.158,27	19.051.811,05	78.249.079,08
11	Jasa Keuangan	6.929.655,67	7.153.612,99	7.349.374,53	8.288.016,18	9.223.274,75	38.943.934,12
12	Real Estate	4.513.529,17	4.941.486,65	4.996.725,97	5.173.252,90	5.760.303,71	25.385.298,40
13	Jasa Perusahaan	1.002.378,39	1.093.577,49	1.069.427,59	1.087.613,84	1.204.676,35	5.457.673,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13.642.393,76	15.077.263,18	16.235.290,19	17.445.211,45	18.619.479,97	81.019.638,55
15	Jasa Pendidikan	9.684.924,22	10.698.965,12	11.391.664,95	11.778.148,97	13.184.732,03	56.738.435,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.192.777,42	3.501.720,89	3.930.068,80	4.281.199,86	4.696.841,04	19.602.608,01
17	Jasa Lainnya	4.447.105,55	4.928.088,15	4.545.891,14	4.939.657,94	5.894.827,26	24.755.570,04
Total		230.367.222,03	245.982.643,66	242.118.758,01	253.101.267,48	285.423.640,08	1.256.993.531,26

Analisis LQ (*Location Quotient*) menunjukkan wilayah-wilayah yang memiliki pusat aktivitas (basis) dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah, serta tingkat kecukupan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan suatu wilayah. Nilai LQ adalah indeks yang membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut.

Analisis LQ juga digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang termasuk kegiatan basis atau bukan basis sehingga dapat melihat kategori sektor unggulan dalam wilayah tertentu. Berdasarkan

konsep basis ekonomi dengan analisis LQ, pendapatan dari sektor basis akan memberikan dampak positif yang luas dalam pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.

Indikator bahwa suatu sektor ekonomi dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan adalah ketika sektor ekonomi tersebut mampu menjadi sektor basis, yakni apabila memiliki nilai *Locations Quotient* (LQ) lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Sedangkan apabila memiliki nilai kurang dari satu ($LQ < 1$) maka tergolong dalam sektor non basis.

Table 3 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata LQ	Keterangan
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58	0,60	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,36	6,76	6,67	6,66	6,68	6,63	Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,60	1,60	1,68	1,54	1,46	1,58	Basis
6	Konstruksi	0,69	0,66	0,66	0,65	0,64	0,66	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	2,21	2,16	2,14	2,09	2,08	2,14	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,86	0,96	0,99	0,93	0,92	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,39	4,24	3,80	3,76	3,74	3,99	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,16	1,12	1,12	1,11	1,10	1,12	Basis
11	Jasa Keuangan	1,84	1,84	1,84	1,84	1,82	1,84	Basis
12	Real Estate	1,76	1,66	1,64	1,62	1,60	1,66	Basis
13	Jasa Perusahaan	1,47	1,46	1,45	1,45	1,44	1,45	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,02	1,01	1,01	0,98	0,96	1,00	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	1,35	1,34	1,34	1,33	1,30	1,33	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,38	2,37	2,41	2,36	2,34	2,37	Basis
17	Jasa Lainnya	2,02	2,05	2,03	1,99	1,96	2,01	Basis
	Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Sektor non basis merupakan sektor yang belum memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kota Bukittinggi, dibuktikan dari nilai $LQ < 1$ seperti Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Namun sektor yang masih masuk ke dalam kategori non basis tidak menutup kemungkinan untuk bertransformasi menjadi sektor basis pada tahun berikutnya.

Sedangkan sektor yang memberi peranan strategis dalam perekonomian Bukittinggi yaitu sektor usaha

dengan nilai $LQ > 1$, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas (6,63); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang (1,58); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda (2,14); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,99); Informasi dan Komunikasi (1,12); Jasa Keuangan (1,84); Real Estate (1,66); Jasa Perusahaan (1,45); Jasa Pendidikan (1,33); Jasa Kesehatan (2,37); serta Jasa Lainnya (2,01).

Selanjutnya penerapan *Shift Share Analysis* untuk mengkaji perubahan struktur ekonomi daerah terhadap ekonomi wilayah yang lebih tinggi sebagai pembandingnya.

Tabel 4 Hasil Analisis *Shift Share* (SS) Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	KPN	KPP	KPPW	PE	PB
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,24	-0,11	0,03	0,16	-0,08
2	Pertambangan dan Penggalian	0,24	-0,05	-0,15	0,04	-0,20
3	Industri Pengolahan	0,24	-0,08	-0,05	0,11	-0,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	-0,19	0,08	0,13	-0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,00	-0,08	0,16	-0,08
6	Konstruksi	0,24	0,05	-0,06	0,24	0,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	0,24	0,10	-0,05	0,29	0,05
8	Transportasi dan Pergudangan	0,24	-0,17	0,11	0,18	-0,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	-0,01	-0,16	0,07	-0,17
10	Informasi dan Komunikasi	0,24	0,27	-0,03	0,48	0,24
11	Jasa Keuangan	0,24	0,09	0,03	0,36	0,12
12	Real Estate	0,24	0,04	-0,08	0,19	-0,04
13	Jasa Perusahaan	0,24	-0,04	0,00	0,20	-0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,24	0,13	-0,04	0,32	0,08
15	Jasa Pendidikan	0,24	0,12	-0,01	0,35	0,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	0,23	0,01	0,48	0,24
17	Jasa Lainnya	0,24	0,09	-0,01	0,32	0,08

Tabel 4 menunjukkan nilai KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional), KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional), KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah dan PE (Pertumbuhan Ekonomi). Apabila nilai KPP bernilai positif maka sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama dalam satu provinsi, begitu pula untuk nilai negatif maka pertumbuhan sektor tersebut cenderung lebih lambat. Dalam hal ini perbandingannya antara Bukittinggi dan Sumatera Barat. Terdapat 10 sektor usaha yang memiliki nilai KPP positif adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

Sedangkan nilai KPPW yang positif menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut mempunyai daya saing dibandingkan dengan sektor lain dalam satu provinsi, begitupun sebaliknya untuk nilai yang negatif. Dari hasil SSA maka sektor yang memiliki daya saing adalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Selanjutnya jika nilai PB bertanda positif artinya sektor tersebut maju (progresif) dibandingkan dengan sektor lain, begitu pun sebaliknya. Sektor yang progresif dalam hal ini Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

Tabel 5 Gabungan Hasil LQ dan Pergeseran Bersih Kota Bukittinggi Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	LQ	PB	Gabungan LQ & PB	Interpretasi
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,05	-0,08	LQ < 1, PB -	Terbelakang
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	-0,20	LQ < 1, PB -	Terbelakang
3	Industri Pengolahan	0,60	-0,13	LQ < 1, PB -	Terbelakang
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	-0,11	LQ > 1, PB -	Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,58	-0,08	LQ > 1, PB -	Potensial
6	Konstruksi	0,66	0,00	LQ < 1, PB +	Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	2,14	0,05	LQ > 1, PB +	Unggulan
8	Transportasi dan Pergudangan	0,92	-0,06	LQ < 1, PB -	Terbelakang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,99	-0,17	LQ > 1, PB -	Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,12	0,24	LQ > 1, PB +	Unggulan
11	Jasa Keuangan	1,84	0,12	LQ > 1, PB +	Unggulan
12	Real Estate	1,66	-0,04	LQ > 1, PB -	Potensial
13	Jasa Perusahaan	1,45	-0,03	LQ > 1, PB -	Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,00	0,08	LQ > 1, PB +	Unggulan
15	Jasa Pendidikan	1,33	0,12	LQ > 1, PB +	Unggulan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	0,24	LQ > 1, PB +	Unggulan
17	Jasa Lainnya	2,01	0,08	LQ > 1, PB +	Unggulan

Penggabungan perhitungan LQ dan SSA dapat dilakukan dan menghasilkan beberapa interpretasi:

- 1) Jika LQ > 1 dan PB bernilai +, maka sektor tersebut **unggulan**;
- 2) Jika LQ > 1 dan PB bernilai -, maka sektor tersebut **potensial**;
- 3) Jika LQ < 1 dan PB bernilai +, maka sektor tersebut **berkembang**;
- 4) Jika LQ < 1 dan PB bernilai -, maka sektor tersebut **terbelakang**.

Terdapat 7 (tujuh) sektor unggulan hasil analisa dan interpretasi menggunakan LQ dan SSA untuk Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda
2. Informasi dan Komunikasi
3. Jasa Keuangan
4. Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

5. Jasa Pendidikan
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7. Jasa Lainnya

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat 17 sektor lapangan usaha, namun hanya 7 sektor yang mampu menjadi unggulan Kota Bukittinggi dan berperan dalam perekonomian daerah. Setelah mengetahui 7 (tujuh) sektor unggulan tersebut, diharapkan akan menjadi manfaat baik untuk masyarakat agar semakin berkontribusi dalam lapangan usaha, untuk pemerintah agar semakin mengembangkan dan mendukung sektor yang belum menjadi unggulan, serta bagi para investor sebagai informasi tambahan untuk pertimbangan berinvestasi pada sektor-sektor unggulan terkait.

Penelitian ini masih memiliki banyak batasan, sehingga besar harapan untuk penelitian selanjutnya

agar melakukan penambahan periode dan variabel penelitian, serta menggunakan metode pengukuran lain dalam penentuan sektor unggulan.

5. REFERENSI

- Anon. n.d. "RANCANGAN AKHIR RPJMD KOTA BUKITTINGGI 2021-2026."
- BPS Kota Bukittinggi. 2021. *Kota Bukittinggi Dalam Angka*. Bukittinggi.
- Firman, Achmad. 2007. "Analisis Dampak Investasi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Di Jawa Tengah." *Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Marsela. 2019. "Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Putra, M. F. 2011. "Studi Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Kuantitatif." *Universitas Brawijaya (UB) Press, Cetakan Pertama*.
- Silvia, Engla Desnim, Yunia Wardi, and Hasdi Aimon. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1(2).
- Sumardi, D. P. 2020. "Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)." *Surakarta: CV. Daiwa Amarta*.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Ed. Rev. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Vol. 48. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.